

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Olahraga memegang peran sentral dalam pembangunan nasional sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat karakter bangsa, dan memperlerat integrasi sosial (Kurniawan, 2022). Di berbagai belahan dunia, olahraga diakui sebagai sarana untuk membangun kohesi sosial, mengembangkan nilai-nilai universal seperti fair play, disiplin, dan kerja sama, serta mempromosikan gaya hidup sehat di tengah meningkatnya tantangan kesehatan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, olahraga telah menjadi bagian integral dari pembangunan jangka panjang. Pemerintah menekankan pentingnya pembangunan olahraga melalui penguatan sistem keolahragaan secara menyeluruh dan berkelanjutan (Ma'mun, 2014). Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang menggantikan UU No. 3 Tahun 2005. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa olahraga merupakan bagian dari pembangunan nasional, dan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berolahraga guna mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

Undang-undang tersebut juga menekankan peran olahraga dalam pencapaian prestasi, pembangunan ekonomi melalui industri olahraga, serta peningkatan daya saing bangsa di tingkat global.

Selain itu, olahraga diposisikan sebagai alat diplomasi dan penguatan bangsa. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), olahraga turut berkontribusi untuk kesehatan (SDG 3), pendidikan inklusif (SDG 4),



kesetaraan gender (SDG 5), serta perdamaian dan inklusi sosial (SDG 16).

Dengan demikian, pengembangan olahraga tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor pemuda dan olahraga, tetapi juga memerlukan kolaborasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional jangka panjang.

Pembinaan olahraga merupakan salah satu tanggung jawab fundamental pemerintah dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan kompetitif (Salahudin et al., 2024). Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak warga negara dalam berolahraga, baik dalam aspek rekreasi, pendidikan, maupun prestasi. Tanggung jawab ini tidak hanya dibebankan kepada pemerintah pusat, tetapi juga kepada pemerintah daerah melalui peran aktif dinas teknis seperti Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

Berdasarkan pada “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan untuk:

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan keolahragaan;
- Menyediakan sarana dan prasarana olahraga;
- Menyelenggarakan pembinaan secara berjenjang dan berkelanjutan;
- Menjamin partisipasi masyarakat dalam kegiatan keolahragaan”.

Pasal 4 UU No. 11 Tahun 2022 menyatakan bahwa pembangunan keolahragaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas



Indonesia melalui pembudayaan, pengembangan, dan olahraga. Ini memperjelas bahwa pembinaan tidak hanya pada pencapaian prestasi, tetapi juga pembentukan pembangunan sosial masyarakat. Pemerintah memiliki

tanggung jawab membentuk sistem pembinaan yang terencana, terstruktur, dan inklusif, terutama untuk cabang olahraga yang potensial seperti karate.

Lebih lanjut, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) mempertegas bahwa keberhasilan olahraga prestasi harus dimulai dari sistem pembinaan usia dini yang terintegrasi dari tingkat daerah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan dalam hal perencanaan, pendanaan, pelatihan, hingga pengembangan sumber daya pelatih dan atlet.

Selain regulasi di tingkat nasional, Pemerintah Kota Makassar juga telah menetapkan payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pembinaan olahraga di tingkat daerah. Hal ini tercermin dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, yang menjadi dasar kelembagaan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar. Selanjutnya, kewenangan teknis Dispora diatur lebih rinci melalui Peraturan Walikota Makassar Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar. Perwali ini menegaskan bahwa Dispora memiliki tugas pokok dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahragaan, termasuk melakukan pembinaan, pengembangan, serta pengawasan terhadap kegiatan olahraga di tingkat kota. Dengan demikian penelitian ini memiliki relevansi yang kuat karena



pada kerangka regulasi yang jelas, baik di tingkat pun daerah, sehingga hasil kajian dapat memberikan ta bagi implementasi kebijakan pembinaan karate di

Dalam implementasinya, dinas olahraga di daerah menjadi ujung tombak pelaksanaan pembinaan melalui berbagai program seperti pelatihan atlet, kompetisi daerah, pemantauan bakat, serta kerja sama dengan perguruan olahraga. Kurangnya perhatian terhadap aspek pembinaan dasar dapat menyebabkan stagnasi prestasi dan lemahnya regenerasi atlet (Muhammad, 2024).

Karate merupakan salah satu cabang olahraga bela diri yang memiliki akar budaya kuat dan telah berkembang luas di Indonesia. Masuk sejak awal 1960-an, olahraga ini berkembang pesat dan menjadi bagian dari sistem pembinaan olahraga nasional. Karate tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga menekankan keseimbangan antara aspek fisik, mental, dan moral yang menjadikannya sebagai media efektif dalam pembentukan karakter, disiplin, dan nilai sportivitas generasi muda (Yasim & Amiluhur, 2024).

Dalam konteks nasional, karate telah menunjukkan kontribusi nyata dalam perolehan prestasi olahraga Indonesia di berbagai ajang internasional seperti SEA Games, Asian Games, dan Kejuaraan Dunia Karate. Indonesia sendiri memiliki organisasi pembina utama, yakni Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI), yang menaungi berbagai perguruan dan bertugas mengatur sistem kompetisi, pelatihan, dan pembinaan atlet dari tingkat daerah hingga nasional.

Karate juga menjadi salah satu cabang olahraga unggulan dalam program Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), karena terbukti mampu mencetak atlet berprestasi dari kalangan usia muda.



binaan yang dimulai dari tingkat pelajar, sekolah, hingga kal menjadi jalur penting untuk menemukan dan kan bakat-bakat potensial.

Secara filosofis dan praktis, karate sangat relevan dalam konteks pembinaan generasi muda di daerah seperti Makassar. Pembinaan karate tidak hanya berdampak pada peningkatan prestasi, tetapi juga memberikan ruang pembentukan kepribadian anak dan remaja yang mandiri, tahan uji, serta memiliki nilai moral yang tinggi. Oleh karena itu, mendukung pembinaan karate di tingkat daerah melalui kebijakan dan fasilitas yang memadai adalah langkah strategis yang akan berdampak ganda: peningkatan prestasi dan pembangunan karakter bangsa.

Karate telah menjadi salah satu cabang olahraga bela diri yang cukup populer di Kota Makassar. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan jumlah dojo (tempat latihan karate), komunitas, serta minat generasi muda terhadap olahraga ini terus meningkat. Karate tidak hanya diminati sebagai olahraga prestasi, tetapi juga sebagai aktivitas pengembangan diri di sekolah dan komunitas lokal. Keberadaan berbagai perguruan seperti GOJUKAI, INKAI, INKANAS, dan Lemkari, dll menjadi indikator bahwa karate memiliki basis massa yang kuat di kota ini.

Pembinaan karate di Makassar tidak dapat dilepaskan dari peran para pelatih, perguruan, serta lembaga pendidikan yang secara aktif menyelenggarakan pelatihan dan kompetisi tingkat lokal. Banyak sekolah menengah, baik negeri maupun swasta, telah menjadikan karate sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler wajib atau pilihan. Hal ini memberikan ruang yang lebih luas bagi siswa untuk mengenal dan mengembangkan bakatnya di bidang bela diri sejak usia dini.



satu kekuatan pembinaan karate di Makassar adalah aktif komunitas karate untuk terus menyelenggarakan gkat kota, open tournament, dan pelatihan bersama. jo bahkan menjalin kerja sama dengan pemerintah

kelurahan dan kecamatan untuk melaksanakan pelatihan karate secara gratis kepada anak-anak dan remaja setempat. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan tingginya semangat pengembangan karate dari akar rumput (*grassroots development*).

Meski demikian, tantangan dalam pembinaan karate di Makassar masih cukup signifikan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan fasilitas latihan yang standar dan layak pakai. Banyak dojo yang masih menggunakan aula sekolah atau lapangan terbuka tanpa perlengkapan latihan memadai seperti tatami, pelindung tubuh, dan ruang kebugaran. Kurangnya fasilitas berdampak pada intensitas dan kualitas latihan, terutama dalam persiapan menghadapi kompetisi tingkat provinsi dan nasional.

Selain itu, pendanaan juga menjadi persoalan yang cukup krusial. Sebagian besar kegiatan pembinaan karate masih mengandalkan iuran peserta atau dukungan sukarela dari orang tua atlet dan komunitas perguruan. Sementara itu, belum semua perguruan karate mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah kota atau Dispora. Ketidakteraturan dalam alokasi anggaran pembinaan menjadikan program latihan tidak berkelanjutan dan sulit merancang pembinaan jangka panjang.

Kendala lain yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah pelatih bersertifikat nasional dan pelatih yang mengikuti perkembangan terbaru dalam teknik maupun metodologi pelatihan. Hal ini menjadi penting mengingat tuntutan prestasi semakin tinggi, sementara pembinaan di tingkat dasar masih sering dilakukan secara tradisional dan tidak terstandarisasi.



Selain itu, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar ini telah menunjukkan inisiatif dalam mendukung pembinaan karate melalui penyelenggaraan event seperti

Kejuaraan Karate Antar Pelajar dan turnamen daerah. Namun, perlu adanya sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur terhadap efektivitas program tersebut, serta memperluas dukungan dalam bentuk pelatihan pelatih, penyediaan fasilitas, dan penguatan kemitraan dengan perguruan karate.

Untuk membangun ekosistem pembinaan karate yang lebih kuat dan berkelanjutan di Kota Makassar, sinergi antara Dispora, sekolah, perguruan, serta masyarakat perlu lebih diperkuat. Perencanaan jangka panjang, investasi pada infrastruktur dan SDM olahraga, serta komitmen pendanaan yang konsisten akan menjadi kunci untuk mendorong kemajuan karate dari tingkat lokal ke tingkat nasional, bahkan internasional.

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar memiliki peran strategis dalam mendukung pembinaan olahraga, termasuk cabang karate. Sebagai lembaga teknis daerah, Dispora bertugas merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan serta program kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan arah pembangunan daerah. Dalam konteks pembinaan karate, Dispora berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan perguruan, sekolah, komunitas olahraga, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dispora Kota Makassar secara rutin menyelenggarakan dan mendukung turnamen kejuaraan antar pelajar dan antar perguruan di tingkat kota. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari program pembinaan atlet usia dini dan remaja. Melalui event seperti “Kejuaraan Karate Pelajar Kota Makassar” atau “Open Tournament Dispora Cup,” atlet-atlet lokal diberi kesempatan untuk meningkatkan kemampuan, mengukur capaian, dan menjalin silaturahmi antar dojo.



Selain turnamen, Dispora juga mendukung kegiatan pelatihan dan pembinaan melalui alokasi bantuan sarana dan prasarana olahraga kepada klub dan perguruan terdaftar. Bantuan ini dapat berupa peralatan latihan seperti pelindung, matras tatami, atau bantuan seragam atlet dan pelatih. Walau jumlah dan frekuensinya masih terbatas, program ini penting untuk mendorong keberlanjutan kegiatan latihan di komunitas karate yang minim anggaran.

Dispora juga bekerja sama dengan FORKI Makassar dan institusi pendidikan dalam penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi pelatih maupun wasit. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam dunia karate, terutama di tingkat pelatih akar rumput. Pelatih bersertifikat sangat dibutuhkan agar pembinaan yang dilakukan tidak hanya teknis, tetapi juga sesuai dengan standar nasional dan internasional.

Namun dalam praktiknya, peran Dispora Makassar belum sepenuhnya optimal akibat beberapa kendala internal dan eksternal. Salah satu kendala internal adalah keterbatasan anggaran daerah untuk sektor keolahragaan, sehingga tidak semua cabang olahraga termasuk karate mendapatkan perhatian dan pembinaan secara merata. Alokasi anggaran sering kali lebih dominan ke olahraga populer tertentu, atau hanya diarahkan pada kegiatan seremoni tanpa memperkuat pembinaan jangka panjang.

Dari sisi eksternal, koordinasi antara Dispora dan perguruan masih sering bersifat informal, sehingga penyusunan program belum sepenuhnya berbasis data dan kebutuhan riil di lapangan. Minimnya jumlah atlet karate aktif, dojo terdaftar, dan capaian menyebabkan kebijakan yang diambil seringkali bersifat strategis. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya



hasil pembinaan, meskipun terdapat potensi atlet berbakat di tingkat lokal.

Dispora Kota Makassar juga memerlukan mekanisme evaluasi dan pelaporan yang lebih sistematis terhadap seluruh kegiatan pembinaan karate. Monitoring terhadap hasil pelatihan, efektivitas turnamen, serta dampak program bantuan masih belum terdokumentasi secara menyeluruh. Evaluasi berbasis kinerja dan capaian atlet dapat menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan pembinaan yang lebih tepat sasaran dan berorientasi jangka panjang.

Untuk memperkuat peran Dispora dalam pembinaan karate, diperlukan pendekatan kolaboratif lintas sektor. Dispora dapat menggandeng institusi pendidikan, organisasi pemuda, dan sektor swasta untuk memperluas akses terhadap pelatihan, kompetisi, serta beasiswa olahraga. Dengan demikian, pembinaan karate di Kota Makassar tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah, tetapi juga didukung oleh ekosistem sosial yang partisipatif dan berkelanjutan.

Meskipun olahraga karate memiliki potensi besar sebagai sarana pembinaan karakter dan peningkatan prestasi generasi muda, pelaksanaan pembinaannya di tingkat daerah seperti Kota Makassar masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar. Permasalahan tersebut bukan hanya bersumber dari keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia, tetapi juga dari belum optimalnya peran instansi teknis pemerintah seperti Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dalam mendesain dan menjalankan sistem pembinaan yang



ur, dan berkelanjutan.

aimana telah dipaparkan sebelumnya, peran Dispora dalam mendukung pembinaan karate memang sudah ada. Dispora telah melaksanakan berbagai kegiatan, namun kontribusinya masih belum

maksimal. Kegiatan seperti turnamen tahunan dan bantuan sarana prasarana belum cukup menjawab kebutuhan mendasar dojo-djo dan atlet karate, terutama dalam hal keberlanjutan latihan, akses terhadap pelatih bersertifikat, serta dukungan pembinaan usia dini. Belum adanya kerangka kebijakan khusus yang mengatur pembinaan karate secara menyeluruh menyebabkan tidak adanya arah dan tolok ukur keberhasilan yang konsisten.

Minimnya dokumentasi resmi dan data yang dapat diakses publik mengenai program pembinaan karate oleh Dispora juga menjadi salah satu kendala akademik dalam mengevaluasi efektivitas program yang telah dilaksanakan. Tanpa data dan pelaporan yang transparan, akan sulit bagi peneliti, akademisi, maupun pemangku kepentingan untuk menilai apakah kebijakan yang diterapkan benar-benar berdampak terhadap peningkatan kualitas dan prestasi atlet karate di Makassar.

Selain itu, masih belum banyak penelitian ilmiah yang secara khusus mengkaji peran kelembagaan pemerintah daerah, khususnya Dispora, dalam pembinaan olahraga cabang tertentu seperti karate. Sebagian besar studi masih bersifat umum atau berfokus pada olahraga populer lainnya seperti sepak bola atau bulu tangkis. Hal ini menjadikan penelitian ini relevan dan signifikan, karena mampu mengisi kekosongan kajian dalam ranah kebijakan olahraga lokal yang berbasis cabang bela diri.

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta di atas, penulis merasa perlu untuk mengangkat topik penelitian ini sebagai upaya



jau dan mengevaluasi peran Dinas Pemuda dan am pembinaan karate, khususnya di wilayah Kota Melalui penelitian ini, diharapkan akan muncul berbasis data dan analisis yang dapat membantu

pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembinaan olahraga yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan komunitas karate.

Oleh karena itu, judul "Peran Dinas Pemuda dan Olahraga dalam Pembinaan Olahraga Karate di Kota Makassar" dipilih karena mencerminkan fokus utama dari penelitian ini, yaitu mengeksplorasi sejauh mana peran aktif Dinas Pemuda dan Olahraga dalam mendukung dan mengembangkan pembinaan karate serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

1.2. Tinjauan Pustaka

1.2.1. Konsep Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang berfungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan secara otonom sesuai dengan prinsip desentralisasi (Said, 2016). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Hal ini bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih responsif dan efektif.

Desentralisasi memberikan ruang bagi daerah untuk merancang kebijakan dan program pembangunan berdasarkan potensi dan kebutuhan lokal, termasuk dalam bidang kepemudaan dan olahraga. Pemerintah pusat tidak lagi menjadi satu-satunya



kendali pembangunan, melainkan berbagi peran pemerintah daerah. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan nasional juga sangat ditentukan oleh kinerja dan pemerintahan di tingkat lokal (Soetandyo, 2012).

Dalam kerangka tersebut, peran pemerintah daerah meliputi beberapa aspek utama, yakni perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi program pembangunan daerah. Dalam konteks ini, sektor keolahragaan termasuk dalam urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab daerah, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 12 ayat 2 yang menetapkan "pemuda dan olahraga" sebagai salah satu bidang urusan pemerintahan konkuren.

Peran organisasi pemerintahan (termasuk pemerintah daerah) dapat diklasifikasikan ke dalam lima fungsi utama: planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), commanding (pengarahan), coordinating (koordinasi), dan controlling (pengawasan) (Mukhtar Latief, 2018). Fungsi-fungsi ini secara operasional tercermin dalam peran pemerintah daerah dalam mengelola sektor publik seperti keolahragaan.

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Iyas Yusuf (2014:05) mengatakan perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk memberdayakan masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

a. Pemerintah Sebagai Regulator



Peran Pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan melalui penerbitan aturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai

instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

b. Pemerintah Sebagai Fasilitator

Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dengan memfasilitasi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang di berdayakan.

c. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Peran Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan di wujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

Di tingkat operasional, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dibentuk sebagai perangkat daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga. Dispora memiliki kewenangan teknis dalam menyusun



strategis pembangunan keolahragaan, mengorganisasi pembinaan, serta menjalin kemitraan dengan berbagai masuk sekolah, komunitas olahraga, dan organisasi olahraga seperti FORKI dalam konteks karate.

Peran pemerintah daerah juga mencakup pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu prinsip dalam pelaksanaan otonomi daerah yang demokratis (Hukum & Sugiarto, 2019). Kegiatan keolahragaan tidak hanya bergantung pada aparatur pemerintah, tetapi juga pada komunitas lokal, LSM, dan dunia usaha yang didorong untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam membangun budaya olahraga dan mencetak atlet berprestasi.

Selain aspek kebijakan dan pelaksanaan program, pengawasan dan evaluasi juga merupakan bagian integral dari peran pemerintah daerah. Evaluasi dibutuhkan untuk menilai efektivitas dan efisiensi program, serta sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Evaluasi ini dapat dilakukan secara internal oleh pemerintah maupun eksternal oleh lembaga pengawas atau pihak akademik yang independen.

Dalam konteks pembangunan olahraga, pemerintah daerah perlu memiliki visi yang jelas dan terarah. Pembinaan olahraga, termasuk cabang bela diri seperti karate, harus terintegrasi dengan program pembangunan pemuda dan pendidikan karakter. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang diluncurkan pemerintah pusat melalui Perpres No. 86 Tahun 2021, yang mendorong sinergi lintas sektor dalam pembinaan olahraga prestasi.

Dengan demikian, agar peran pemerintah daerah benar-benar berdampak pada pembinaan olahraga seperti karate, pendekatan tata kelola yang baik (*good governance*), transparan, dan akuntabel. Penguatan kelembagaan sporas, peningkatan kapasitas SDM, serta dukungan



kebijakan anggaran yang proporsional menjadi kunci sukses implementasi peran tersebut.

1.2.2. Peran Pemerintah dalam Pembinaan Olahraga

Pemerintah memegang peran vital dalam membentuk dan mengembangkan sistem keolahragaan nasional yang menyeluruh, berjenjang, dan berkelanjutan. Di Indonesia, peran pemerintah dalam pembinaan olahraga diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang merupakan pembaruan dari UU sebelumnya. UU ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berolahraga, dan pemerintah wajib menyediakan dukungan berupa kebijakan, fasilitas, pembinaan, dan perlindungan hukum dalam kegiatan keolahragaan.

Dalam regulasi tersebut, pemerintah baik pusat maupun daerah bertugas menyelenggarakan pembinaan olahraga secara holistik melalui tiga jalur utama: olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Masing-masing jalur memiliki karakteristik dan kebutuhan pembinaan tersendiri, tetapi seluruhnya memerlukan peran aktif pemerintah dalam penyediaan infrastruktur, pelatih, kompetisi, dan sistem seleksi yang adil.

Olahraga prestasi, yang menjadi fokus dalam konteks pembinaan karate, membutuhkan sistem yang terencana mulai dari penjangkaran bakat, pelatihan rutin, hingga keikutsertaan dalam turnamen lokal hingga internasional. Menurut Harsono (1988), pembinaan olahraga adalah suatu proses jangka panjang yang memerlukan dukungan sarana-prasarana, pelatih yang profesional, organisasi pendukung yang stabil. Pemerintah bertugas menggerakkan utama proses tersebut melalui lembaga teknis



seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di pusat dan Dispora di daerah.

Selain itu, pemerintah harus menyediakan anggaran khusus untuk olahraga, baik melalui APBN maupun APBD. Dukungan finansial sangat krusial karena sebagian besar cabang olahraga, termasuk karate, belum memiliki sumber pendanaan mandiri yang kuat. Di tingkat daerah, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam menetapkan prioritas penganggaran dan memastikan bahwa semua cabang olahraga, termasuk yang tidak terlalu populer, tetap mendapatkan porsi pembinaan yang memadai.

Peran pembinaan pemerintah tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga bersifat kolaboratif. Pemerintah didorong untuk membentuk kemitraan dengan sekolah, komunitas, lembaga swasta, dan organisasi olahraga seperti FORKI (Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia). Sinergi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pembinaan yang inklusif, di mana atlet bisa berkembang melalui berbagai jalur pembinaan baik formal di sekolah maupun informal di dojo.

Dispora sebagai pelaksana teknis program pembinaan olahraga di daerah memiliki tanggung jawab untuk membuat perencanaan strategis jangka pendek, menengah, dan panjang. Perencanaan ini meliputi pelatihan atlet, pengembangan SDM pelatih, penyelenggaraan kompetisi lokal, dan penyediaan fasilitas latihan. Program seperti kompetisi antar sekolah, pelatihan serta pengiriman atlet ke turnamen provinsi dan menjadi bentuk nyata peran pemerintah.



un, peran ini tidak tanpa tantangan. Banyak daerah
n memiliki peta jalan pembinaan olahraga berbasis data

dan riset. Hal ini menyebabkan perencanaan olahraga tidak terarah dan tidak berkelanjutan. Widodo dan Kustiawan (2020) menunjukkan bahwa di banyak daerah, pembinaan olahraga masih bergantung pada minat pribadi kepala dinas atau kepala daerah, bukan pada sistem institusional yang kuat.

Untuk mengatasi itu, pemerintah melalui Perpres No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) telah merancang kerangka kerja pembinaan olahraga nasional yang lebih terstruktur. DBON menekankan pentingnya pembinaan usia dini, integrasi antara dunia pendidikan dan olahraga, serta pelibatan pemerintah daerah sebagai kunci sukses pembangunan olahraga. Pemerintah daerah diarahkan untuk mendukung DBON melalui penyesuaian kebijakan daerah dan dukungan anggaran.

Salah satu indikator keberhasilan peran pemerintah dalam pembinaan olahraga adalah peningkatan prestasi atlet di berbagai tingkatan kompetisi. Namun, aspek pembinaan karakter dan nilai-nilai moral juga menjadi perhatian penting dalam sistem pembinaan, terutama di cabang seperti karate yang menanamkan nilai hormat, kedisiplinan, dan pengendalian diri. Pemerintah harus memastikan bahwa pembinaan olahraga tidak hanya berorientasi pada medali, tetapi juga pada pembentukan SDM yang berkarakter unggul.

Evaluasi peran pemerintah dalam pembinaan olahraga perlu dilakukan secara berkala dan berbasis data. Tanpa evaluasi yang sistematis, program pembinaan akan berisiko stagnan atau tidak sejalan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, lembaga olahraga perlu menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan untuk melakukan riset dan pemetaan kebutuhan pembinaan secara komprehensif.



Peran pemerintah dalam pembinaan olahraga adalah peran strategis yang mencakup aspek kebijakan, kelembagaan, pendanaan, dan kolaborasi. Agar pembinaan olahraga seperti karate berkembang optimal, pemerintah harus menjadi katalisator yang tidak hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga menghidupkan semangat dan budaya olahraga di tengah masyarakat.

Pemerintah memiliki peran fundamental dalam membangun ekosistem olahraga yang terstruktur, stabil, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberi mandat oleh konstitusi untuk menjamin hak masyarakat dalam mengakses olahraga sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa negara wajib menyediakan kebijakan, fasilitas, pembinaan, dan perlindungan hukum bagi seluruh kegiatan olahraga. Pemerintah Kota Makassar sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah wajib menerjemahkan amanat tersebut ke dalam bentuk program dan kebijakan pembinaan olahraga, termasuk karate, agar proses pembinaan dapat berkembang secara terarah dan sistematis. Peran ini menunjukkan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan olahraga.

Kebijakan pembinaan olahraga di Indonesia dilaksanakan melalui tiga jalur utama yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Pemerintah daerah bertugas n ketiga jalur tersebut memperoleh porsi pembinaan adai dan proporsional. Dalam konteks olahraga prestasi ate, pemerintah harus menyediakan sistem pembinaan njang mulai dari identifikasi bakat, pelatihan intensif,



hingga keikutsertaan atlet dalam kompetisi resmi. Tanggung jawab ini selaras dengan tujuan pembinaan nasional yang menghendaki lahirnya atlet unggul dari berbagai daerah. Pemerintah menggunakan jalur kebijakan tersebut untuk memperkuat struktur pembinaan karate melalui kolaborasi dengan organisasi olahraga dan perguruan.

Olahraga prestasi memerlukan perencanaan jangka panjang yang terukur dan berbasis analisis kebutuhan. Pemerintah harus memastikan bahwa pembinaan atlet memiliki arah strategis yang jelas dengan menyediakan pelatih terlatih, fasilitas latihan memadai, serta standar kompetisi yang sesuai ketentuan. Harsono (1988) menjelaskan bahwa pembinaan olahraga merupakan proses berkesinambungan yang memerlukan dukungan perangkat kelembagaan dan sumber daya manusia profesional. Pemerintah Kota Makassar menerapkan konsep ini ketika merancang program pembinaan karate melalui penguatan dojo, penyediaan pelatih, dan pelaksanaan turnamen berjenjang. Langkah ini memperlihatkan peran pemerintah sebagai motor penggerak sistem keolahragaan daerah.

Dalam pembinaan olahraga, pemerintah berkewajiban mengalokasikan anggaran melalui APBN maupun APBD sebagai sumber pendanaan utama. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pembayaran honor pelatih, bantuan peralatan atlet, serta penyelenggaraan kompetisi. Peran pendanaan ini sangat penting karena sebagian besar cabang



termasuk karate, belum memiliki kemandirian finansial. Pemerintah Kota Makassar memanfaatkan mekanisme untuk mendukung kegiatan pembinaan karate dan setiap pengeluaran sesuai prioritas pembangunan

olahraga. Peran pendanaan menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan nyata bagi pengembangan olahraga prestasi.

Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai aktor pengendali kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam pembinaan olahraga. Pemerintah perlu menjalin kemitraan dengan sekolah, komunitas olahraga, lembaga swasta, serta organisasi olahraga seperti Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI). Kemitraan tersebut memungkinkan terjadinya sinergi sumber daya dan pengalaman sehingga pembinaan karate dapat berjalan dalam ekosistem yang lebih inklusif dan komprehensif. Pola kolaborasi ini memperlihatkan bahwa pemerintah perlu memperkuat jejaring agar pembinaan olahraga tidak hanya mengandalkan sumber daya internal pemerintah semata.

Dispora sebagai pelaksana teknis pembinaan olahraga daerah memegang tanggung jawab strategis dalam mengembangkan kebijakan, program, dan manajemen kegiatan olahraga. Dispora Kota Makassar harus menyusun perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang yang mendukung pembinaan karate secara terarah. Program seperti peningkatan kompetensi pelatih, penyelenggaraan kompetisi usia dini, dan pengiriman atlet ke tingkat provinsi merupakan contoh implementasi peran ini. Pemerintah daerah melalui Dispora harus memastikan bahwa pembinaan karate memiliki arah pembangunan



di kebutuhan atlet, organisasi olahraga, dan masyarakat. Di sisi lain, jika pemerintah memiliki peran strategis, tantangan dalam pengembangan pembinaan olahraga masih ditemukan di banyak daerah. Widodo dan Wawan (2020) menunjukkan bahwa beberapa daerah

belum memiliki peta jalan pembinaan olahraga yang komprehensif. Kondisi tersebut menyebabkan pembinaan karate sering bergantung pada kebijakan pimpinan daerah, bukan pada sistem kelembagaan yang kuat. Pemerintah perlu menyempurnakan tata kelola pembinaan melalui penerapan pendekatan berbasis data yang mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing cabang olahraga. Perbaikan tata kelola ini penting untuk memastikan keberlanjutan pembinaan karate di daerah.

Pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) sebagai kerangka pembangunan olahraga nasional jangka panjang. DBON mengarahkan pembinaan olahraga prestasi untuk dimulai dari usia dini, diperkuat oleh dunia pendidikan, dan didukung oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kota Makassar perlu mengadaptasi DBON dalam kebijakan lokal agar pembinaan karate selaras dengan sistem pembinaan nasional. Implementasi DBON menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kontribusi signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan olahraga Indonesia.

Salah satu indikator keberhasilan peran pemerintah dalam pembinaan olahraga adalah meningkatnya prestasi atlet di berbagai jenjang kompetisi. Pemerintah harus memastikan bahwa pembinaan karate tidak hanya berfokus pada pencapaian medali, tetapi juga pada pengembangan karakter atlet. Karate sebagai olahraga yang mengedepankan nilai-nilai disiplin, hormat, dan an diri memiliki peran penting dalam membentuk muda. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembinaan rggabungkan aspek teknis dan nilai-nilai moral untuk



menghasilkan atlet yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas.

Evaluasi kebijakan pembinaan olahraga perlu dilakukan secara berkala agar pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan dan merancang perbaikan program di masa mendatang. Pemerintah daerah harus menilai efektivitas penggunaan anggaran, peningkatan kualitas pelatih, serta perkembangan prestasi atlet. Kerja sama dengan perguruan tinggi menjadi strategi yang relevan untuk menguatkan kapasitas evaluasi. Penelitian akademik dapat membantu pemerintah melihat dinamika pembinaan olahraga secara objektif dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih akurat. Evaluasi yang berkesinambungan memperlihatkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembinaan karate.

Peran pemerintah dalam pembinaan olahraga juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia pelatih dan wasit. Pemerintah perlu menyediakan pelatihan berjenjang agar pelatih karate memiliki sertifikasi yang sesuai standar internasional maupun nasional. Program peningkatan kompetensi pelatih menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembinaan karena kualitas pelatihan sangat bergantung pada kemampuan teknis dan pedagogis pelatih. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan FORKI dalam menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi sehingga kualitas pelatih karate di Makassar terus meningkat seiring tuntutan kompetisi modern.



erintah berperan dalam memastikan ketersediaan prasarana olahraga yang memadai. Fasilitas latihan yang dapat memengaruhi proses pembinaan atlet dan kesiapan mereka untuk bertanding. Pemerintah Kota

Makassar harus menyediakan gedung latihan, matras karate, ruang fitness, dan instrumen pelatihan lainnya sesuai standar yang ditetapkan organisasi olahraga. Penyediaan fasilitas yang memadai akan membantu atlet karate meningkatkan kualitas latihan dan mengurangi risiko cedera. Peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas mencerminkan tanggung jawab negara dalam mendukung kesehatan dan kebugaran masyarakat.

Pemerintah juga bertugas memastikan bahwa pembinaan olahraga bersifat inklusif dan dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat. Dalam konteks karate, pemerintah dapat membuka kelas latihan untuk pemula, perempuan, pelajar, dan kelompok berkebutuhan khusus. Pendekatan inklusif ini membantu memperluas jangkauan pembinaan olahraga dan menciptakan ruang partisipasi yang lebih luas di tingkat komunitas. Kebijakan inklusivitas menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pencapaian prestasi, tetapi juga pada pemerataan akses terhadap olahraga sebagai hak warga negara.

Pada tingkat kebijakan, pemerintah memiliki peran dalam merumuskan peraturan daerah, petunjuk teknis, serta standar operasional pembinaan olahraga. Kebijakan tersebut menjadi pedoman bagi organisasi olahraga dalam melaksanakan latihan, mengelola kompetisi, dan membina atlet secara profesional. Pemerintah Kota Makassar perlu menyusun regulasi yang sesuai kebutuhan pembinaan karate agar kegiatan setiap dojo dapat berjalan seragam dalam satu kerangka pembangunan olahraga.



latif ini menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas pembinaan.

erintah harus menjaga hubungan baik dan komunikasi ngan organisasi olahraga sebagai mitra utama dalam

pembinaan karate. Melalui koordinasi yang efektif, pemerintah dapat memastikan bahwa kegiatan pembinaan berjalan konsisten dan searah dengan tujuan pembangunan olahraga daerah. Pemerintah perlu membangun forum komunikasi rutin bersama pengurus cabor, perguruan karate, sekolah, dan pelatih sehingga setiap pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai arah pembinaan. Peran komunikasi ini memperkuat sinergi dalam sistem pembinaan olahraga.

Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan luas untuk menentukan prioritas pembinaan olahraga berdasarkan karakteristik lokal. Pemerintah Kota Makassar harus memahami potensi karate sebagai olahraga yang diminati masyarakat dan memiliki peluang prestasi tinggi. Pertimbangan tersebut harus menjadi dasar dalam penyusunan program dan anggaran pembinaan karate agar sesuai kebutuhan daerah. Peran otonomi daerah memungkinkan pemerintah membuat kebijakan pembinaan olahraga yang lebih responsif terhadap kondisi lokal.

Pemerintah berperan penting dalam memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Melalui penyuluhan, kampanye olahraga, serta penyelenggaraan event komunitas, pemerintah dapat menumbuhkan budaya olahraga di masyarakat. Karate sebagai bagian dari olahraga beladiri dapat diperkenalkan melalui program ekstrakurikuler sekolah, kegiatan karang taruna, dan turnamen antar kecamatan. Peran partisipatif ini membantu pemerintah menciptakan masyarakat yang aktif dan sehat serta regenerasi atlet.



pemerintah perlu memastikan keberlanjutan pembinaan melalui skema kaderisasi atlet. Dalam skema ini, pemerintah sama dengan dojo untuk menjaring atlet usia dini yang

memiliki potensi fisik dan mental untuk dibina lebih lanjut. Pemerintah perlu menyediakan program pemantauan jangka panjang dan sistem seleksi yang transparan agar pembinaan berjalan konsisten. Kaderisasi yang terencana membantu menjamin kesinambungan prestasi karate dari waktu ke waktu.

Selain mendukung atlet, pemerintah harus memperhatikan kebutuhan organisasi olahraga dalam pengelolaan administrasi dan kegiatan. Pemerintah dapat memberikan bantuan operasional, pelatihan manajemen organisasi, serta pendampingan hukum agar perguruan karate mampu berfungsi secara profesional. Peran ini penting untuk memastikan organisasi olahraga dapat menjalankan aktivitas pembinaan tanpa hambatan struktural. Penguatan organisasi menjadi bagian integral dalam pembangunan olahraga.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjamin keamanan dan keselamatan atlet selama proses pembinaan. Standar keselamatan seperti penggunaan alat pelindung tubuh, prosedur latihan, dan protokol kesehatan harus diterapkan dengan ketat dalam pembinaan karate. Pemerintah perlu memantau fasilitas latihan dan kegiatan kompetisi untuk memastikan bahwa semua kegiatan olahraga berlangsung dalam kondisi aman. Peran ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi atlet sebagai aset pembangunan olahraga.

Pembinaan olahraga modern menuntut pemerintah menyediakan akses terhadap teknologi pendukung latihan.

Pemerintah dapat menyediakan peralatan analisis gerak, aplikasi



in latihan, serta fasilitas fitness yang dilengkapi teknologi membantu pelatih dalam mengevaluasi teknik dan meminimalkan risiko cedera. Pemerintah Kota Makassar bekerja sama dengan universitas atau sektor swasta untuk

menyediakan teknologi latihan bagi atlet karate. Peran ini memperlihatkan adaptasi pemerintah terhadap perkembangan dunia olahraga.

Dalam pembinaan olahraga, pemerintah harus memastikan bahwa nilai-nilai sportivitas dan etika atlet dijaga dengan baik. Pemerintah melalui Dispora dapat memberikan pendidikan karakter, pelatihan etika bertanding, serta bimbingan konseling bagi atlet karate. Pendidikan nilai dalam olahraga sangat penting karena karate menekankan prinsip hormat, kesopanan, dan pengendalian diri. Pemerintah harus menjadikan pembinaan karakter sebagai bagian integral dari program latihan.

Pemerintah juga bertanggung jawab mempromosikan olahraga sebagai bagian dari identitas daerah. Pemerintah Kota Makassar dapat menjadikan karate sebagai ikon olahraga daerah yang diintegrasikan dalam event budaya, festival olahraga, dan program promosi daerah. Upaya ini tidak hanya memperkuat citra daerah, tetapi juga meningkatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam karate. Peran branding ini penting dalam menciptakan hubungan antara olahraga dan pembangunan daerah.

Pemerintah perlu mendukung pelaksanaan kompetisi berjenjang sebagai sarana pengembangan atlet karate. Kompetisi berfungsi sebagai media evaluasi, pengukuran kemampuan, dan pembentukan mental bertanding. Pemerintah harus menyediakan anggaran rutin untuk menyelenggarakan kejuaraan lokal serta atlet mengikuti kompetisi provinsi dan nasional. yang berkesinambungan akan membantu mengukur pembinaan karate.



Dalam menjalankan peran pembinaan, pemerintah harus menjaga transparansi anggaran dan akuntabilitas pelaksanaan program. Pengawasan internal dan eksternal perlu dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai tujuan. Pemerintah Kota Makassar dapat melibatkan inspektorat daerah dan lembaga pengawas independen guna meningkatkan akuntabilitas pembinaan olahraga. Peran ini menunjukkan bahwa pemerintah harus mempertanggungjawabkan setiap kegiatan pembinaan kepada masyarakat.

Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan pembinaan olahraga dirumuskan berdasarkan riset ilmiah dan analisis data. Pemerintah dapat bekerja sama dengan universitas untuk melakukan studi kebutuhan, evaluasi pembinaan, dan pengembangan metode latihan yang lebih efektif. Pendekatan berbasis riset memungkinkan pemerintah merumuskan kebijakan pembinaan karate yang lebih akurat dan relevan. Peran ini meningkatkan kualitas pembinaan olahraga daerah.

Dalam konteks sosial, pemerintah berperan dalam menggunakan olahraga sebagai sarana memperkuat kohesi masyarakat. Melalui kegiatan karate yang terstruktur, pemerintah dapat membangun interaksi sosial antar pemuda dan mendorong gaya hidup positif. Olahraga menjadi medium pembentuk solidaritas, disiplin, dan rasa memiliki. Pemerintah dapat memperkuat hubungan sosial masyarakat melalui pembinaan karate yang berorientasi komunitas.



erintah perlu mengembangkan program pembinaan yang ramah gender. Karate merupakan cabang yang diikuti oleh laki-laki maupun perempuan. Pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelatih yang mampu melatih atlet

perempuan secara profesional. Program kesetaraan gender dalam karate membantu memperluas partisipasi dan meningkatkan kualitas pembinaan.

Pemerintah juga memegang peran dalam mendorong sponsorship dan kemitraan pendanaan dengan sektor swasta. Pemerintah dapat membuka peluang bagi perusahaan lokal untuk mendukung kegiatan pembinaan karate melalui CSR atau sponsorship kompetisi. Pendekatan ini membantu mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah semata dan memperkuat keberlanjutan program pembinaan. Sinergi pendanaan menjadi kunci keberlanjutan pembinaan karate.

Pemerintah harus menjaga keberlanjutan pembinaan olahraga dengan menyediakan sistem penghargaan bagi atlet dan pelatih. Penghargaan menjadi motivasi bagi atlet agar terus berprestasi dan bagi pelatih agar meningkatkan kompetensinya. Pemerintah dapat menyediakan bonus prestasi, pelatihan gratis, dan insentif lainnya untuk meningkatkan motivasi. Peran penghargaan ini membantu menciptakan lingkungan pembinaan karate yang positif dan produktif.

1.2.3. Konsep Pembinaan Olahraga Karate

Karate merupakan cabang olahraga beladiri yang berakar dari Jepang dan berkembang menjadi sistem latihan yang mengintegrasikan unsur fisik, mental, dan spiritual. Olahraga ini memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan karakter karena setiap teknik dan latihan menuntut disiplin, ketekunan, serta



morale. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai regulasi dan kebijakan, memberikan perhatian khusus terhadap cabang olahraga ini karena potensinya dalam membentuk generasi muda yang kuat. Nilai-nilai seperti hormat, keberanian, dan

pengendalian diri menjadikan karate bukan sekadar olahraga, tetapi juga sarana pendidikan informal bagi peserta didik di berbagai daerah.

Perkembangan karate di Indonesia mengalami peningkatan signifikan sejak diperkenalkan pada tahun 1960-an. FORKI sebagai induk organisasi yang membawahi seluruh perguruan karate telah memainkan peran penting dalam menyatukan standar latihan dan kompetisi nasional. FORKI (2023) mengoordinasikan berbagai perguruan seperti INKAI, INKANAS, Lemkari, dan lainnya untuk memastikan bahwa kegiatan latihan, ujian kenaikan tingkat, dan kejuaraan dapat berjalan dalam satu sistem yang terstruktur. Peran FORKI membantu memastikan bahwa pembinaan karate tidak terfragmentasi, melainkan berjalan konsisten dalam bingkai kelembagaan olahraga nasional.

Pembinaan karate di Indonesia berlangsung melalui dua jalur utama, yaitu jalur formal dan non-formal. Jalur formal mencakup sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya yang menyediakan unit kegiatan karate sebagai bagian dari pengembangan diri peserta didik. Jalur non-formal dilaksanakan melalui dojo atau perguruan yang memiliki kurikulum internal dan jenjang latihan yang terstandarisasi. Kedua jalur ini saling melengkapi dan memberikan ruang yang lebih luas bagi anak-anak, remaja, maupun dewasa untuk mengikuti latihan karate. Sistem pembinaan yang memadukan jalur formal dan non-formal menciptakan ekosistem latihan yang inklusif dan berkelanjutan.



struktur pembinaan karate dilakukan secara berjenjang tingkat dasar (Kyu), menengah, hingga tingkat sabuk 1). Sistem ini membantu pelatih mengatur program berdasarkan usia, kemampuan teknis, dan kesiapan fisik

atlet. Tahapan latihan ini juga menjadi dasar dalam menentukan kelayakan seorang karateka untuk mengikuti kompetisi tertentu. Pembinaan berjenjang memastikan bahwa setiap atlet berkembang sesuai ritme pembelajaran yang tepat sehingga tidak mengalami cedera atau kelelahan berlebih selama latihan intensif. Model jenjang ini diadopsi hampir di seluruh perguruan karate di Indonesia.

Pelatih menjadi aktor sentral dalam proses pembinaan karate. Menurut Harsono (1988), pembinaan olahraga tidak hanya berkaitan dengan teknik fisik, tetapi melibatkan pemahaman mengenai psikologi olahraga, nutrisi, biomekanika, dan strategi latihan. Dalam karate, pelatih harus menguasai tiga komponen utama, yaitu kihon (teknik dasar), kata (jurus), dan kumite (pertarungan). Pelatih juga perlu memahami periodisasi latihan, pemulihan, dan pembentukan mental bertanding. Kompetensi pelatih menentukan arah pembinaan sehingga pendidikan dan sertifikasi pelatih menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem karate di Indonesia.

Dalam pembinaan karate, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi aspek yang tidak dapat disepelekan. Dojo yang layak, lantai latihan yang aman, matras tatami, punching pad, dan perlengkapan pelindung merupakan kebutuhan dasar bagi atlet. Pemerintah daerah, sekolah, serta perguruan harus memastikan fasilitas tersebut tersedia agar proses latihan berjalan efektif. Di beberapa daerah, keterbatasan fasilitas masih menjadi hambatan kualitas latihan tidak optimal. Oleh karena itu, pemerintah memainkan peran aktif dalam memberikan dukungan finansial kepada dojo-dojos yang membutuhkan.



Kompetisi berjenjang menjadi komponen penting dalam sistem pembinaan karate. Kompetisi berfungsi sebagai alat evaluasi bagi pelatih dan atlet untuk mengukur perkembangan teknik, kekuatan mental, serta kesiapan fisik menghadapi turnamen yang lebih besar. Kejuaraan lokal, provinsi, nasional, hingga internasional seperti SEA Games atau Kejuaraan Dunia WKF memberikan pengalaman bertanding yang sangat berharga bagi atlet. Melalui kompetisi, atlet dapat memperbaiki teknik, mengasah ketenangan, dan memahami strategi lawan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kompetisi terlaksana rutin agar pembinaan karate berjalan optimal.

Nilai-nilai etika menjadi bagian utama dari filosofi karate. Dojo Kun sebagai pedoman moral mengajarkan karateka untuk menghormati guru, mengendalikan ego, serta menjaga persahabatan dengan sesama karateka. Nilai-nilai ini membentuk mentalitas positif yang sangat berguna bagi perkembangan karakter pemuda. Karate tidak hanya mencetak atlet berprestasi, tetapi juga manusia berkepribadian matang. Oleh karena itu, pembinaan karate berperan sebagai media pendidikan karakter yang sangat relevan untuk diterapkan dalam sekolah dan institusi kepemudaan.

Perkembangan karate modern menuntut pelatih dan atlet memahami pendekatan ilmiah dalam pelatihan. Periodisasi latihan, pengukuran fleksibilitas, analisis kekuatan, dan pemantauan biometrik menjadi bagian penting dalam meningkatkan performance. Penerapan metode ilmiah ini menunjukkan bahwa karate memasuki ranah profesional di mana pelatih harus berinovasi dengan tradisi dengan ilmu keolahragaan. Pelatih dan atlet



yang menguasai teknik ilmiah dapat meningkatkan efektivitas latihan dan mengurangi risiko cedera.

Peran pemerintah dalam pembinaan karate sangat signifikan karena pembinaan tidak dapat berlangsung tanpa dukungan kebijakan dan pendanaan. Pemerintah daerah melalui Dispora harus melakukan pemetaan kebutuhan dojo, membantu penyediaan perlengkapan latihan, dan menyelenggarakan pelatihan pelatih dan wasit. Pemerintah juga harus memberikan insentif bagi atlet muda berprestasi agar mereka termotivasi untuk terus mengembangkan kemampuan. Peran dukungan kebijakan ini menjadi fondasi keberhasilan pembinaan karate di tingkat lokal.

Pemerintah pusat melalui Kemenpora juga memainkan peran dalam menetapkan standar nasional pembinaan karate. Kemenpora bekerja sama dengan FORKI dalam menentukan kurikulum latihan, kriteria pelatih, dan sistem sertifikasi wasit. Kerja sama ini memastikan bahwa pembinaan karate berjalan sesuai standar internasional, terutama standar yang diterapkan oleh World Karate Federation (WKF). Harmonisasi standar ini penting agar atlet Indonesia mampu bersaing di kancah internasional.

Salah satu tantangan dalam pembinaan karate adalah kurangnya kesinambungan pembinaan dari tingkat dasar hingga elite. Banyak atlet muda mengalami stagnasi karena minimnya kesempatan mengikuti turnamen, pelatih yang kurang memenuhi standar, atau fasilitas latihan yang belum optimal. Tantangan ini harus diatasi melalui intervensi pemerintah dalam bentuk



1 program latihan berjenjang, pencarian bakat di
kolah, dan peningkatan kapasitas dojo-dojos kecil.
1 dapat bekerja sama dengan perguruan karate untuk
at rantai pembinaan.

Pembinaan karate membutuhkan sistem rekrutmen atlet yang terencana dan berkelanjutan. Pelatih harus mampu mengidentifikasi bakat potensial dari usia dini dan memberikan program latihan sesuai perkembangan fisik dan mental atlet. Pemerintah daerah dapat mendukung proses ini dengan menyediakan event pencarian bakat atau kompetisi kelompok umur. Sistem rekrutmen yang baik memastikan bahwa pembinaan karate memiliki fondasi yang kokoh.

Dalam pembinaan karate, retensi atlet menjadi aspek penting. Banyak atlet berbakat mengundurkan diri karena kurangnya insentif, fasilitas minim, atau beban akademik. Pemerintah daerah perlu menyediakan program beasiswa, insentif prestasi, dan fasilitas latihan yang memadai agar retensi atlet lebih baik. Retensi yang tinggi memungkinkan pembinaan karate berkembang dengan stabil dan menghasilkan atlet yang mampu bersaing di tingkat nasional.

Pembinaan karate juga harus memperhatikan aspek regenerasi agar keberlanjutan prestasi dapat terjaga. Regenerasi membutuhkan mekanisme pemantauan jangka panjang, pelatihan usia dini, dan kaderisasi pelatih. Pemerintah daerah dapat mendorong dojo untuk menyediakan program khusus anak dan remaja sebagai upaya regenerasi. Regenerasi yang baik menciptakan kesinambungan prestasi yang berkelanjutan.

Selain pelatih, peran wasit sangat penting dalam dunia karate. Wasit berkualitas menentukan kelancaran pertandingan. Standar kompetisi tetap adil. Pemerintah melalui FORKI harus memastikan tersedianya pelatihan wasit berkala. Wasit yang kompeten membantu menciptakan



atmosfer kompetisi yang profesional dan mendukung perkembangan atlet.

Perkembangan pembinaan karate tidak terlepas dari dukungan organisasi olahraga di tingkat daerah. Pengurus cabang memiliki peran penting dalam mengoordinasikan pelaksanaan turnamen, pelatihan pelatih, dan pengembangan dojo. Pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas organisasi olahraga melalui bantuan administrasi, pelatihan manajemen, dan dukungan pendanaan. Penguatan organisasi membantu menciptakan tata kelola pembinaan karate yang lebih efektif.

Peran keluarga juga berpengaruh besar dalam pembinaan karate. Keluarga memberikan dukungan moral, waktu, dan finansial kepada atlet selama menjalani latihan intensif. Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan kegiatan edukasi bagi orang tua tentang pentingnya dukungan keluarga dalam proses latihan. Keterlibatan keluarga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan atlet.

Sarana pendidikan seperti sekolah dan universitas berperan dalam mendukung pembinaan karate. Unit kegiatan karate menjadi wadah bagi pelajar untuk mengikuti latihan terstruktur dan mengikuti kompetisi antar sekolah. Pemerintah dapat bekerja sama dengan sekolah untuk meningkatkan fasilitas latihan dan menyediakan pelatih berkualitas bagi unit karate. Kemitraan ini memperkuat jalur pembinaan formal.



Pembinaan karate modern juga harus mempertimbangkan kesehatan dan nutrisi. Pelatih dan atlet perlu memahami pola makan seimbang, hidrasi, dan strategi pemulihan setelah latihan intensif. Pemerintah daerah dapat menyediakan fasilitas kesehatan olahraga atau bekerja sama dengan ahli gizi

untuk membantu dojo. Peningkatan kesadaran nutrisi membantu atlet mencapai performa optimal.

Teknologi digital juga mulai digunakan dalam pembinaan karate. Aplikasi analisis gerak, video slow-motion, dan platform evaluasi teknik membantu pelatih meningkatkan kualitas instruksi. Pemerintah dapat mendukung penerapan teknologi melalui penyediaan perangkat atau pelatihan pelatih dalam penggunaan teknologi. Integrasi teknologi menunjukkan bahwa pembinaan karate terus beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Di beberapa daerah, dojo kecil masih menghadapi tantangan pendanaan. Pemerintah daerah dapat menyediakan bantuan operasional atau memberikan akses terhadap fasilitas latihan publik. Dukungan ini penting agar dojo kecil dapat terus menjalankan kegiatan latihan dan tidak terhenti karena keterbatasan dana. Pemerintah perlu memperhatikan kesenjangan fasilitas antara dojo besar dan kecil.

Pembinaan karate juga harus memperhatikan aspek keselamatan atlet. Pemerintah daerah bersama FORKI harus memastikan bahwa dojo menerapkan standar keselamatan seperti penggunaan alat pelindung, pengawasan latihan yang ketat, dan pemeriksaan kesehatan berkala. Keselamatan menjadi faktor penting agar pembinaan karate berjalan tanpa risiko cedera serius.

Selain aspek teknis dan fisik, karate juga mengajarkan nilai-nilai spiritual melalui meditasi, etika, dan penghormatan. Nilai spiritual ini memperkuat pembinaan mental atlet sehingga mereka mengendalikan emosi selama bertanding. Pemerintah dapat mendukung aspek ini dengan menyediakan pelatihan konseling bagi atlet muda. Pembinaan mental menjadi bagian penting dalam pembinaan karate.



Globalisasi juga memengaruhi perkembangan karate di Indonesia. Atlet harus memahami perkembangan aturan WKF, perubahan teknik modern, serta adaptasi terhadap gaya bertarung internasional. Pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan atau workshop yang menghadirkan pelatih internasional. Pelatihan tersebut membantu atlet Indonesia mengikuti perkembangan karate dunia.

Pembinaan karate di daerah memerlukan komitmen lintas sektor. Pemerintah, perguruan karate, sekolah, dan masyarakat harus bekerja bersama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan atlet. Pemerintah daerah perlu mengoordinasikan seluruh aktor pembinaan agar program berjalan harmonis. Kolaborasi ini menjadi kunci keberhasilan pembinaan karate jangka panjang.

Dukungan media publik menjadi aspek tambahan dalam pembinaan karate. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan media sosial atau media lokal untuk mempromosikan prestasi atlet dan kegiatan dojo. Peningkatan eksposur publik dapat menumbuhkan minat masyarakat untuk mengikuti latihan karate. Media juga berfungsi sebagai sarana edukasi mengenai manfaat karate bagi generasi muda.

Program pembinaan karate harus memperhatikan inklusivitas gender. Pemerintah perlu memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti latihan, ujian kenaikan tingkat, dan kompetisi. Penguatan ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraanraga. Pemerintah dapat menyediakan fasilitas khususam pelatihan yang ramah perempuan.



Pembinaan karate membutuhkan dukungan psikologis bagi atlet muda. Pemerintah daerah dapat menyediakan layanan psikologi olahraga yang membantu atlet mengatasi kecemasan bertanding, tekanan kompetisi, dan stres latihan. Penguatan aspek psikologis membantu atlet tampil lebih percaya diri dan stabil dalam menghadapi turnamen. Layanan ini menjadi bagian penting dalam pembinaan modern.

Pemerintah juga harus memperhatikan aspek administrasi dan tata kelola pembinaan karate. Administrasi yang baik memastikan bahwa kegiatan latihan, kompetisi, dan sertifikasi dapat berjalan efektif dan terdokumentasi. Pemerintah daerah dapat memberikan pelatihan manajemen organisasi bagi pengurus perguruan karate. Tata kelola yang baik menciptakan sistem pembinaan yang profesional.

Keberhasilan pembinaan karate tidak hanya bergantung pada satu pihak, tetapi merupakan hasil sinergi antara pemerintah, pelatih, atlet, perguruan, sekolah, dan masyarakat. Pemerintah harus menjadi katalisator yang mendorong integrasi berbagai pihak dalam sistem pembinaan. Pembinaan karate yang efektif akan menghasilkan atlet berprestasi dan berkepribadian mulia. Dengan peran semua pihak, karate dapat menjadi kekuatan positif dalam pembangunan generasi muda Indonesia.

1.2.4. Konsep Kebijakan Publik di Bidang Kepemudaan dan Olahraga



Kebijakan publik di bidang kepemudaan dan olahraga sebagai seperangkat keputusan pemerintah yang untuk mengatur prioritas pembangunan pemuda dan olahraga prestasi di tingkat daerah. Pemerintah Kota menyusun kebijakan melalui Dinas Pemuda dan

Olahraga sebagai institusi yang memiliki mandat struktural untuk membina atlet, menyediakan sarana latihan, dan mengembangkan organisasi olahraga. Howlett dan Ramesh (2019) memandang kebijakan publik sebagai pola tindakan pemerintah untuk merespons persoalan sosial. Pemerintah Kota Makassar menerapkan perspektif tersebut ketika mengidentifikasi kebutuhan pembinaan karate sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang lebih luas. Orientasi ini menempatkan kebijakan sebagai alat penggerak pembangunan pemuda dan olahraga.

Tahapan kebijakan publik pada sektor kepemudaan dan olahraga mengikuti proses agenda setting, formulation, adoption, implementation, dan evaluation sebagaimana dijelaskan Dunn (2018). Pemerintah Kota Makassar menempatkan persoalan terbatasnya fasilitas latihan karate, kurangnya pelatih bersertifikat, dan minimnya kompetisi sebagai isu yang perlu direspons melalui kebijakan. Pemerintah kemudian merancang alternatif kebijakan yang melibatkan organisasi olahraga dan sekolah. Tahapan ini menunjukkan bahwa kebijakan olahraga mengikuti pola rasional-administratif yang mengutamakan analisis kebutuhan. Proses ini memperlihatkan keterhubungan antara persoalan yang muncul di lapangan dan tindakan pemerintah dalam bentuk program pembinaan.

Kebijakan kepemudaan bertujuan memperkuat kapasitas pemuda melalui pembentukan karakter, peningkatan keterampilan, dan pemberian ruang partisipasi yang luas. Pemerintah daerah



h dasar normatif dari Undang-Undang Kepemudaan menekankan pentingnya peran negara dalam pembangunan. Arnstein (2017) menjelaskan bahwa partisipasi pemuda akan efektivitas kebijakan karena pemuda dapat

menyampaikan aspirasinya secara langsung. Pemerintah Kota Makassar memanfaatkan kegiatan karate sebagai wahana pembentukan karakter pemuda melalui aktivitas yang mengembangkan kedisiplinan, kerja sama, dan kemampuan pengendalian diri. Kebijakan ini menautkan agenda pembinaan olahraga dengan agenda pembangunan kepemudaan.

Kebijakan olahraga menuntut penyusunan strategi pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Green (2015) menegaskan bahwa pembangunan olahraga harus mengintegrasikan aspek kesehatan, pendidikan, dan kohesi sosial. Pemerintah Kota Makassar menerapkan gagasan ini melalui dukungan terhadap penyediaan perguruan karate, penyelenggaraan turnamen daerah, serta fasilitasi pelatih. Pemerintah menyusun kebijakan agar pembinaan karate tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga pada pembentukan nilai-nilai positif bagi pemuda. Orientasi multidimensi ini menjadi ciri kebijakan olahraga modern yang menempatkan olahraga sebagai media pembangunan masyarakat.

Dalam proses perumusan kebijakan, pemerintah mempertimbangkan asas efektivitas, pemerataan, efisiensi, dan akuntabilitas sebagai pedoman dalam pengelolaan sektor publik. Easton (2016) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan respon pemerintah terhadap input sosial seperti aspirasi masyarakat, dinamika organisasi olahraga, dan kondisi sarana-prasarana. Pemerintah Kota Makassar menerima berbagai



dari atlet, pelatih, dan pemangku kepentingan karate. Hal ini kemudian menimbulkan kebutuhan pembinaan yang lebih terarah. Pemerintah kemudian memberikan output berupa penyediaan pelatih, bantuan peralatan, serta penyusunan regulasi

pembinaan. Interaksi ini menjelaskan bagaimana kebijakan olahraga karate merupakan produk dari kebutuhan sosial dan fungsi pemerintahan daerah.

Keberhasilan implementasi kebijakan kepemudaan dan olahraga sangat dipengaruhi oleh kapasitas pelaksana. Konsep implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa kinerja implementasi dipengaruhi oleh enam variabel utama: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial-ekonomi-politik, serta disposisi pelaksana. Dispora Kota Makassar menerapkan kerangka ini ketika menjalankan pembinaan karate dengan memperjelas tujuan pembinaan, menata struktur organisasi olahraga, serta meningkatkan komunikasi dengan perguruan. Model ini membantu menjelaskan hubungan antara kualitas implementasi dan keberhasilan pembinaan olahraga.

Pemerintah Kota Makassar menjalankan kebijakan pembinaan karate melalui koordinasi yang intensif antara pemerintah, organisasi olahraga, sekolah, dan keluarga atlet. Rhodes (2012) menekankan bahwa governance dalam kebijakan publik bergantung pada jaringan aktor yang saling bergantung. Pembinaan karate memperlihatkan pola interaksi tersebut ketika pelatih, pengurus perguruan, dan pemerintah harus bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan pembinaan. Pemerintah berperan sebagai mediator yang mengatur pembagian tugas, pengelolaan serta pemantauan kegiatan latihan. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam olahraga.



Aspek sosial dan budaya dalam pembinaan karate membuat pemerintah memasukkan nilai-nilai lokal dalam kebijakan olahraga. Coalter (2019) menjelaskan bahwa olahraga dapat menjadi sarana pembentukan identitas dan perilaku sosial yang positif. Pemerintah Kota Makassar memanfaatkan potensi karate untuk memperkuat integrasi sosial pemuda melalui kegiatan latihan dan kompetisi yang terstruktur. Proses pembinaan karate mendorong pemuda mengembangkan etika dan disiplin sehingga kebijakan olahraga tidak hanya berfokus pada hasil kompetitif. Pemerintah menempatkan pembinaan olahraga sebagai strategi pembangunan karakter.

Kebijakan kepemudaan memberikan ruang luas bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan olahraga. Checkoway (2018) menegaskan bahwa keterlibatan pemuda dalam proses pembangunan dapat meningkatkan kualitas pemerintahan lokal. Pemerintah memanfaatkan karate sebagai ruang belajar sosial bagi pemuda, yang memungkinkan mereka mengembangkan keterampilan interpersonal dan kepemimpinan. Program pembinaan karate yang difasilitasi pemerintah menjadi bagian dari strategi peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah. Keterlibatan ini memperkuat hubungan antara kebijakan kepemudaan dan kebijakan olahraga.

Dinamika politik dan ekonomi daerah turut memengaruhi arah kebijakan olahraga. Kingdon (2011) menjelaskan bahwa kebijakan muncul ketika masalah, solusi kebijakan, dan dinamika bertemu pada momentum tertentu. Pemerintah Kota merespons meningkatnya minat pemuda terhadap aspirasi masyarakat olahraga dengan menyediakan yang lebih besar bagi pembinaan. Perhatian pimpinan



daerah terhadap prestasi atlet membantu mempercepat penyusunan program pembinaan dan alokasi anggaran. Perspektif ini menunjukkan bahwa kebijakan olahraga merupakan produk interaksi antara aspirasi sosial dan konfigurasi politik daerah.

Evaluasi kebijakan publik di sektor olahraga menjadi mekanisme penting untuk menilai efektivitas pembinaan karate. Patton dan Sawicki (2020) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan harus memberikan informasi objektif dan terukur kepada pembuat kebijakan. Pemerintah Kota Makassar menggunakan indikator seperti prestasi atlet, jumlah event, kualitas pelatih, dan tingkat partisipasi pemuda untuk menilai keberhasilan pembinaan karate. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki program pelatihan, memperbaiki mekanisme seleksi atlet, dan menyesuaikan anggaran. Evaluasi ini menjaga kualitas kebijakan olahraga yang dilaksanakan pemerintah daerah.

Pemerintah menerapkan pendekatan evidence-based policy untuk memperkuat kualitas kebijakan kepemudaan dan olahraga. Head (2017) menjelaskan bahwa kebijakan berbasis bukti mengandalkan data empiris untuk merancang intervensi pemerintah yang tepat sasaran. Pemerintah Kota Makassar mengumpulkan data jumlah atlet, hasil kompetisi, kapasitas perguruan, dan kondisi sarana sebelum merumuskan program pembinaan karate. Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan yang disusun mencerminkan kebutuhan faktual masyarakat olahraga. Penggunaan data membuat kebijakan lebih responsif bel.



ulasi dan tata kelola organisasi olahraga menjadi penting dalam kebijakan olahraga prestasi. Hoyer dan (2016) menjelaskan bahwa kualitas tata kelola organisasi

olahraga sangat menentukan keberhasilan pembinaan atlet. Pemerintah Kota Makassar menyusun peraturan teknis pembinaan karate dan memperkuat lembaga olahraga seperti pengurus cabang agar mampu menjalankan tugas secara profesional. Regulasi yang jelas membantu mengatur proses seleksi atlet, standar latihan, dan mekanisme kompetisi. Pemerintah menata sistem pembinaan agar sesuai dengan standar nasional.

Kebijakan kepemudaan dan olahraga pada tingkat daerah juga mencakup penguatan kelembagaan organisasi atlet dan pemuda. Scott (2015) menjelaskan bahwa kelembagaan yang kuat mampu menjaga keberlanjutan implementasi kebijakan publik. Pemerintah memberikan pendampingan administrasi, pelatihan manajemen organisasi, dan fasilitasi jejaring antarperguruan karate. Penguatan lembaga olahraga membantu memastikan bahwa pembinaan dapat berlangsung secara mandiri dan terstruktur. Pendekatan kelembagaan ini mendukung keberlanjutan kebijakan olahraga di Kota Makassar.

Aspek pemerataan akses menjadi prinsip penting dalam kebijakan kepemudaan dan olahraga. Fraser (2016) menegaskan bahwa kebijakan publik harus memberikan kesempatan setara bagi setiap warga untuk mengembangkan potensi diri. Pemerintah Kota Makassar membuka akses pembinaan karate bagi pelajar, pemuda komunitas, dan atlet pemula tanpa memandang latar belakang sosial. Program ini memperluas partisipasi dan memperkuat keadilan sosial dalam pembangunan olahraga.



usivitas menjadi landasan penting bagi kebijakan publik kepemudaan.

biayaan menjadi faktor penentu keberlanjutan karate. Crompton (2018) menjelaskan bahwa

pembiayaan olahraga perlu memperhatikan analisis kebutuhan dan dampak sosial. Pemerintah Kota Makassar mengalokasikan anggaran rutin untuk pembinaan karate melalui APBD dan mengembangkan kemitraan dengan pihak swasta untuk mendukung event dan peralatan latihan. Sistem pembiayaan yang terencana membantu memastikan bahwa program pembinaan dapat berjalan stabil sepanjang tahun. Pendekatan ini menghubungkan aspek fiskal dengan keberhasilan kebijakan olahraga.

Kebijakan kepemudaan dan olahraga menempatkan pemuda dan atlet sebagai pusat pembangunan melalui pendekatan human development. Sen (2014) menjelaskan bahwa pembangunan manusia mengutamakan perluasan kapabilitas individu. Pemerintah Kota Makassar menerapkan prinsip tersebut dengan memberikan pelatihan karate yang memperkuat kompetensi fisik, karakter, dan kepercayaan diri pemuda. Kegiatan pembinaan karate menjadi wahana pengembangan diri pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan lokal. Kebijakan ini memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia di daerah

1.2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori akan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.



lasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amanda Syamsul Bahri, & Nurkaidah (2023) dengan judul Fungsi

Dan Peran Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dalam Peningkatan Prestasi Olahraga Di Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga sudah menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan baik, mem-back up seluruh kegiatan-kegiatan cabang olahraga yang ada, mendorong cabang olahraga agar lebih meningkatkan prestasi. Faktor penghambat kinerja yaitu kurangnya anggaran dana, sarana prasana yang tidak sesuai standar, dan tidak adanya jaminan kesehatan kepada atlet (Salsabila et al., 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hieronimus Alfrado Kaka Dawa (2023) Dengan Judul Peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sebagai Fasilitator Dalam Pembinaan Atlet Karate di Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dari dinas kepemudaan dan olahraga Kota Kupang masih sangatlah kurang akan tetapi dinas kepemudaan dan olahraga harus lebih memperhatikan kebutuhan cabang olahraga karate dalam hal ini pendanaan dan sarana dan prasarana agar setiap kebutuhan atlet bisa terpenuhi dalam latihan maupun pertandingan (Dawa, 2023).

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang sebelumnya, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai regulator dalam pengembangan olahraga karate di Kota Makassar?



Bagaimana peran Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai fasilitator dalam pengembangan olahraga karate di Kota Makassar?

3. Bagaimana peran Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai dinamisator dalam pengembangan olahraga karate di Kota Makassar?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran rumusan masalah sebelumnya, diperoleh tujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan peran Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai regulator dalam pengembangan olahraga karate di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan peran Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai fasilitator dalam pengembangan olahraga karate di Kota Makassar.
3. Untuk mengetahui dan menggambarkan peran Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai dinamisator dalam pengembangan olahraga karate di Kota Makassar.

1.5. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu meningkatkan pengetahuan tentang administrasi publik, kebijakan olahraga, dan manajemen kelembagaan daerah. Secara khusus, temuan penelitian ini dapat menambah literatur akademik tentang peran pemerintah daerah dalam pembinaan olahraga cabang bela diri seperti karate. Penelitian ini juga diharapkan menjadi sumber teoritis bagi siswa, akademisi, dan yang tertarik untuk menyelidiki topik serupa, terutama hubungan antara pengembangan olahraga lokal dan publik.



b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembinaan olahraga, khususnya cabang karate di Kota Makassar. Untuk Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengevaluasi berbagai program, kebijakan, dan praktik pembinaan yang telah diimplementasikan. Studi ini akan membantu Dispora mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan dalam menerapkan pembinaan karate di tingkat daerah. Dengan cara ini, lembaga-lembaga ini dapat membuat strategi pembinaan yang lebih sesuai dengan lingkungan lokal, responsif, dan berkelanjutan.



BAB II

METODE PENELITIAN

Metode penelitian secara sederhana adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Proses ini harus mengikuti prinsip-prinsip ilmiah seperti rasional, empiris, dan sistematis, serta menghasilkan data yang asli dan dapat diamati (Sugiyono, 2019).

2.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Alasan peneliti melakukan pendekatan kualitatif adalah untuk menganalisis pengembangan Olahraga Karate yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan mencari informasi kepada pihak yang bersangkutan terkait peran Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pengembangan olahraga karate di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada. Jadi, peneliti akan mengumpulkan data dari para informan tentang bagaimana peran dinas pemuda dan olahraga dalam pengembangan olahraga karate di Kota Makassar. Jenis deskriptif digunakan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki. Data-data yang berupa kata, frasa, kalimat, dan gambar yang terdapat dalam sebuah



2.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Dinas Pemuda dan Olahraga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Secara geografis, Lokasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar terletak di Menara Balaikota Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 2, Kecamatan Wajo, Kota Makassar.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan, termasuk penelitian langsung di lapangan, pengumpulan data, dan pengolahan informasi sesuai dengan tujuan penelitian.

2.3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya oleh peneliti. Ini berarti data tersebut dikumpulkan langsung dari responden melalui observasi, wawancara, atau kuesioner, bukan dari sumber yang sudah ada sebelumnya.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti dokumen, arsip, laporan, buku, atau sumber data lain yang dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder biasanya digunakan untuk melengkapi atau mendukung data primer dalam sebuah penelitian.

2.4. Informan Penelitian



Informan penelitian adalah individu yang memberikan informasi kepada peneliti atau pewawancara mendalam tentang hal-hal yang lain, atau subjek kejadian tertentu. Dalam penelitian

ini yang menjadi informan penelitian dari penelitian ini ada beberapa pihak yaitu:

- a. Kepala bidang peningkatan prestasi olahraga DISPORA Kota Makassar
- b. Kepala bidang pemberdayaan olahraga DISPORA Kota Makassar
- c. Sekretaris Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) Kota Makassar
- d. Atlet karate Kota Makassar

2.5. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada peran Dinas Pemuda Dan Olahraga dalam pembinaan olahraga karate di Kota Makassar dengan menggunakan teori peran menurut Iyas Yusuf (2014:05) tentang 3 indikator peran yaitu, peran sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator.

a. Peran Regulator

Peran Pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

b. Peran Dinamisator

Peran Pemerintah sebagai dinamisator adalah menannerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-
a dalam proses pembangunan untuk mendorong dan
hara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah
an melalui pemberian bimbingan dan pengarahan
intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya



pemberian bimbingan di wujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

c. Peran Fasilitator

Peran Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatangi berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang di berdayakan.

2.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sebagai suatu metode yang independen terhadap metode analisis dan atau bahkan menjadi alat utama metode dan teknik analisis data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi meliputi:

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Metode observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat bagaimana peran Dinas Pemuda Dan Olahraga dalam pelaksanaan olahraga karate di Kota Makassar.

icara

Wawancara yaitu sebuah proses untuk memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab



sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang-orang yang diwawancarai dan jawaban responden di catat atau direkam dengan alat perekam. Dalam hal ini peneliti menggunakan model wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan dengan lebih dulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban alternatif. Namun dalam pelaksanaannya lebih bebas dan terbuka dimana pihak informan dimintai pendapat dan ide-ide dan pewawancara mencatat apa yang disampaikan informan.

c. Analisis Dokumen

Analisis dokumen dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mengolah data dari berbagai sumber dokumen untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

2.7. Teknik Analisis Data

Analisis dokumen dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mengolah data dari berbagai sumber dokumen untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

a. Reduksi Data

Tahap reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, dan membuang yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.



b. Penyajian Data

Menyajikan data dalam bentuk seperti matriks, grafik, tabel, dan lain-lain disebut display data. Data dalam

penelitian kualitatif dapat disajikan dalam bentuk bagan, diagram singkat, atau hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Tahap penyajian data yang meliputi pengklarifikasian dan identifikasi data. Dalam kasus ini, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks, tetapi hasil penelitian dapat diperjelas dengan tabel atau gambar.

c. Penarikan Kesimpulan

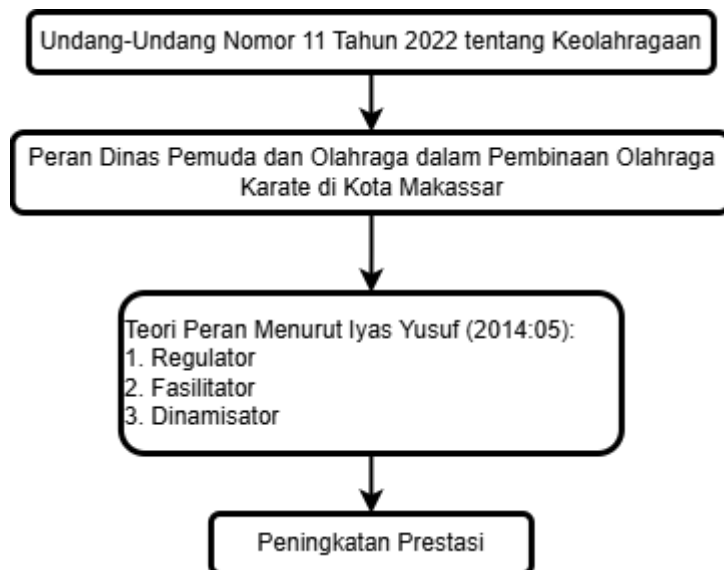
Tahap penarik kesimpulan dalam penelitian ini merupakan aktifitas pemberian makna dan memberikan penjelasan terhadap hasil penyajian data yang diperoleh dari analisis data. Salah satu metode analisis data adalah verifikasi, yang merupakan tahap akhir penelitian. Penelitian kualitatif menghasilkan penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Hasil tersebut dapat berupa gambaran atau deskripsi suatu objek yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.



2.8. Kerangka Konsep

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, maka tergambar beberapa konsep yang akan dijadikan sebagai acuan peneliti dalam mengaplikasikan penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1. 1. Kerangka Konsep



Sumber: Diolah, 2025

